BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beberapa aspek pendidikan telah dikenal oleh khalayak pada umumnya yang berkaitan dengan corak sosial, sebagai mana perilaku tersebut ada pendidikan formal, informal dan non formal. Ke tiga aspek pendidikan ini memiliki makna koheren sesuai dengan prinsip pendidikan bahwa pendidikan sendiri iyalah proses pembaharuan polapikir dan tingka laku manusia yang lebih bermanusiawi, sehingga demikian mengapa pentingnya pendidikan, karena pendidikan merupakan alat ukur bagi kemajuan bangsa dan negara sebagaimana yang dibilang dalam UUD 1945 tepat pada aliniea Ke II.

Pendidikan politik di landasi oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11 huruf a, b, c, d, dan e. Partai politik berfungsi sebagai, a) sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasrakat, berbangsa dan bernegara, b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, c) penghisap, merangkul, dan pendistribusi aspirasi politik masyarakat dalam perumusan dan menetapkan keputusan Negara, d) partisipasi politik warga Negara Indonesia, e) rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.(Uud 45)

Pasal 31 ayat 1 Pendidikan Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain, a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Karena dengan adanya kader-kader yang berkualitas bisa mengukur eksistensi partai politik dalam persaingan perebutan kekuasaan yang sah. Pendidikan politik harus diberikan kepada kader-kader partai politik dan masyarakat umum, bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo,2008).

Politik di Indonesia tidak seperti apa yang diinginkan, karena seluruh partai politik baik yang lama maupun yang baru berdiri kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik. Hal ini bisa terjadi seperti maraknya money politic, angka golput tinggi karena kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan haknya dalam pemberian suara. Dengan masalah-masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan kepemiluan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang politik. Partai politik mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan masyarakat seperti yang diatur dalam

Undangundang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa partai politik mempunyai kewajiban untuk melalakukan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Kelalaian dari pada partai politik dan juga kurangnya pengembangan literasi soal pendidikan politik terhadap masyarakat yang mestinya itu diinisiatif oleh instansi pemerintah terkait memberikan pemahaman tentang bagaimana jadi pemilih atau sebagai partisipasi politik lebih mengedepankan pemahaman tentang pendidikan politik agara tidak memilh seorang pemimpin untuk menduduki jabatan jabatan strategis yang hanya mendahului kepentingan kelompoknyan dari pada kemakmuran orang banyak.

Keberlansungan pemahaman tentang pendidikan politik tersebut sangat jarang sekali kita temukan partai partai politik dan lembaga terkait pemeritahan terjun lansung memberikan edukasi politik terhadap masyarakat dengan berhadap hadapan lansung dan bahkan ada juga tidak sama sekali, dewasa ini Indonesia memiliki sejarah pendidikan politik cukup panjang perjalanannya degan dua peristiwa sejarah sangat bersahabat di dunia pendidikan dan politik, pada tahun 1965-66 runtuhnya orde lama dan tahun 1998 runtuhnya Orde baru atau dengan sapaan Reformasi. Konflik di dua tahun yang berbeda tersebut merupakan satu cerminan kelalaian edukasi pendidikan politik untuk bangsa Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lembaga terkait sehingga menimbulkan kekacauan yang cukup merugikan kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Pendidikan politik saat ini biasa di katakan sebagai pengembangan sesuai dengan misi pendidikan sesungguhnya berdasarkan, Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dari sarat inilah kenapa pentingnya pendidikan politik ditingkat formal, informal, dan non formal. Atas dasar peristiwa di atas, saya melihat dan mengetahui sejau mana ke efektifan pendidikan di masyarakat sehingga mendorong saya utuk suatu judul "Implementasi Pendidikan Politik Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Desa Bobisingo Kec. Galela Utara, Kab. Halmahera Utara".

B. Rumusan Masalah

Atas dasar batasan masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penilitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pendidikan politik dalam masyarakat di Desa Bobisingo?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan politik di masyarakat Desa Bobisingo ?

C. Tujuan Penilitian

tujuan penilitian yang ingin dicapai adalah sebagai untuk

- 1. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang politik yang baik
- 2. Mereka mampu mengetahui dan memahami apa itu politik.

D. Manfaat penilitian

1. Manfaat teoritis

Bahan penelitian tersebut dapat digunakan untuk penambah wawasan pengetahuan dalam ilmu Ppkn, terkhususnya tentang pendidikan politik dalam masyarakat.

2. Manfaat praktik

Bagi guru dan pengiat politik penilitian ini diharapkan dapat menamba khasanah wawasan bagi guru dan pengiat politik untuk mengembangkan tentang pendidikan politik di sekolah dan masyarakat. Sebagai peneliti, untuk bertambah pengetahuan dan pengalam sehingga dapat dilakukan penilitian lanjut dan dapat dijadikan pengalaman sebagai peneliti yangs baru